

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penerapan *persona non grata* dalam kasus diplomatik antara Kanada dan Tiongkok pada tahun 2023, ketika Kanada mengusir diplomat Zhao Wei akibat tuduhan intimidasi terhadap anggota parlemen yang dibalas Tiongkok dengan pengusiran Jennifer Lynn Lalonde. Fokus penelitian mencakup penerapan konsep *persona non grata* dalam kasus tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik ini. Pendekatan penelitian adalah normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang mengkombinasikan *statute approach* melalui analisis Konvensi Wina 1961 dan instrumen hukum internasional terkait, serta *case approach* yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam kasus konkret, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan data dianalisis secara deduktif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kanada menerapkan *persona non grata* terhadap Zhao Wei karena telah melanggar Pasal 41 Konvensi Wina 1961 dengan mengintimidasi anggota parlemen yang kemudian dibuktikan melalui investigasi intelijen, sementara tindakan Tiongkok merupakan penerapan prinsip resiprositas dalam bentuk retorsi. Akibat hukum yang timbul mencakup berakhirnya fungsi diplomatik kedua pejabat tersebut berdasarkan Pasal 43 huruf (b) Konvensi Wina 1961; pemberian perlindungan hukum selama masa transisi sesuai Pasal 39 ayat (2) Konvensi Wina 1961, termasuk perlindungan kepada anggota keluarganya berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961; penyediaan perlindungan dan fasilitas keberangkatan sesuai Pasal 29 dan 44 Konvensi Wina 1961. Selain itu, negara pengirim berkewajiban untuk memanggil pulang diplomatnya dan mengatur transisi fungsi diplomatik secara terstruktur.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, *Persona non grata*

ABSTRACT

This research examines the legal implications of persona non grata implementation in the 2023 diplomatic case between Canada and China, when Canada expelled diplomat Zhao Wei for alleged parliamentary intimidation, prompting China's reciprocal expulsion of Jennifer Lynn Lalonde. The research focuses on the implementation of the persona non grata concept in this case and the legal consequences arising from this practice. The research approach is normative with descriptive-analytical specifications, combining statute approach through analysis of the 1961 Vienna Convention and related international legal instruments, and case approach by examining the implementation of diplomatic legal principles in concrete cases, with data collection techniques through library research and data analyzed deductively-qualitatively. Findings reveal that Canada implemented persona non grata against Zhao Wei for violating Article 41 of the 1961 Vienna Convention by intimidating parliamentarians, which was proven through intelligence investigations, while China's action represented the application of the reciprocity principle in the form of retorsion. The resulting legal consequences include the termination of both officials' diplomatic functions under Article 43(b) of the 1961 Vienna Convention; legal protection during the transition period under Article 39(2) of the 1961 Vienna Convention, including protection for family members under Article 37(1) of the 1961 Vienna Convention; provision of protection and departure facilities according to Articles 29 and 44 of the 1961 Vienna Convention. Additionally, the sending state is obligated to recall its diplomat and arrange a structured transition of diplomatic functions.

Keywords: *Legal Implications, Persona non grata*